JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) Vol. 6 No. 2, Des 2020, Hal. 185-198
https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe P-ISSN: 2502-3020, E-ISSN: 2502-4159

DETERMINAN PENERAPAN PEDOMAN AKUNTANSI PESANTREN PADA PESANTREN MITRA KERJA BANK INDONESIA

Farida Ratna Dewi[1], Murniati Mukhlisin[2], Sigid D. Pramono[3]
[1,2,3]Institut Agama Islam Tazkia, Bogor, Indonesia
Email: farida@apps.ipb.ac.id

ABSTRACT

The aim of this study was to analyze the application of accounting at BI partner pesantren and to analyze internal external factors that influence the application of accounting guidelines. boarding school. The object of the research was the partner pesantren of BI which had participated in the socialization with a sample of 31 pesantren using purposive sampling method. Quantitative research methods with data processing using the PLS Structural Equation Modeling (SEM). The results showed that 84% of the sample recorded the acquisition value of land, buildings (mosques, madrasas, offices) and petty cash and 94% of the samples did not revaluate the value of these assets. Internal factors which include awareness of sharia recording, organizational commitment, availability of technological devices, competence of human resources, Islamic boarding school funding structure, organizational structure, and managerial abilities of leaders jointly influence the implementation of pesantren accounting guidelines. External factors which include authority policies, policies of the parties providing assistance/cooperation, socialization of guidelines, technical training and technical assistance collectively affect the implementation of the pesantren accounting guidelines. In order to support the application of these accounting guidelines, apart from the need for socialization, training on technical assistance in making financial records is also necessary.

Keywords: Islamic boarding school accounting guidelines, asset revaluation, internal factors, external factors

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan akuntansi pada pesantren mitra kerja BI dan menganalisis faktor internal eksternal yang mempengaruhi penerapan pedoman akuntansi pesantren. Objek penelitian adalah pesantren mitra kerja BI yang telah mengikuti sosialisasi dengan sampel sebanyak 31 pesantren menggunakan metode purposive sampling. Metode penelitian kuantitatif dengan pengolahan data menggunakan *Structural equation Modelling* (SEM) PLS. Hasil penelitian menunjukkan 84% sampel melakukan pencatatan nilai perolehan tanah, bangunan (masjid, madrasah, kantor), dan kas kecil dan 94% sampel tidak melakukan revaluasi terhadap nilai aset tersebut. Faktor internal yang meliputi kesadaran pencatatan secara syariah, komitmen organisasi, ketersediaan perangkat teknologi, kompetensi sumber daya manusia, struktur pendanaan pesantren, struktur organisasi, dan kemampuan manajerial pimpinan secara bersama-sama mempengaruhi penerapan pedoman akuntansi pesantren. Faktor eksternal yang meliputi kebijakan otoritas, kebijakan pihak pemberi bantuan/kerjasama, sosialisasi pedoman, pelatihan teknis dan pendampingan teknis secara bersama-sama mempengaruhi penerapan pedoman akuntansi pesantren. Untuk mendukung penerapan pedoman akuntansi tersebut selain perlu adanya sosialisasi, perlu juga diadakan pelatihan pendampingan teknis pembuatan pencatatan keuangan.

Keywords: pedoman akuntansi pesantren, revaluasi aset, faktor internal, faktor eksternal

KETERANGAN ARTIKEL
Riwayat Artikel: diterima: 10 November 2020; direvisi: 7 Desember 2020; disetujui: 21 Desember 2020
Klasifikasi JEL: M41
Cara Mensitasi: Dewi, F. R., dkk. (2020). Determinan Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren pada Pesantren Mitra Kerja Bank Indonesia. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 6(2), 185-198. https://doi.org/10.34204/jiafe.v6i2.2222
Copyright©2020. JIAFE (Jurnal Akuntansi Ilmiah Fakultas Ekonomi) Universitas Pakuan

PENDAHULUAN

Tujuan pendidikan menurut Al-Attas (1975) adalah mengembalikan manusia kepada fitrah kemanusiaannya bukan pengembangan intelektual atas dasar manusia sebagai warga negara yang identitas kemanusiaannya diukur sesuai dengan perannya dalam kehidupan bernegara. Sedangkan tujuan utama pendidikan menurut Islam adalah pendidikan moral atau akhlak dan pengembangan kecakapan atau keahlian yang tidak hanya mengacu kepada kecerdasan otak saja namun kepada psikologis dari sisi agama yang akan membentuk karakter siswa. Maka lembaga pendidikan agama seharusnya dapat mencapai tujuan utama pendidikan menurut Islam tersebut.

Hasil penelitian Izfana, dkk. (2012) mengenai implementasi pendidikan karakter di pondok pesantren bahwa Pondok Pesantren Darunnajah mengadopsi pendekatan pendidikan karakter yang komprehensif dengan meletakkan nilai-nilai Islam sebagai filosofi utamanya. Pola pendidikan yang dilakukan adalah mendidik dan mengembangkan karakter siswa dengan menanamkan pengetahuan, menciptakan kondisi atau lingkungan yang mendukung, serta memberi kesempatan untuk siswa berlatih dalam pembentukan karakter.

Peran pesantren dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pesantren ditetapkan sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan keagamaan (pasal 30 ayat 4). Menurut Kementerian Agama peran penting pesantren adalah (1) penguatan kader ulama, (2) penguatan pendidikan berkarakter, dan (3) pendidikan berbasis kewirausahaan. Berdasarkan tujuan pendidikan dalam Islam tersebut, maka Pesantren memikul tanggung jawab yang besar, sehingga dituntut pengelolaan yang lebih baik dan profesional, hal ini agar pesantren dapat menjalankan perannya dengan optimal. Namun kondisi riilnya pesantren tidak didukung dengan penerapan manajemen modern, sehingga proses yang berjalan di pesantren adalah alami dan tradisional, selain itu kuatnya pengaruh pemimpin di pesantren sehingga resisten terhadap akuntabilitas (Yahya, 2015).

Akuntabilitas pada pesantren menjadi hal yang harus segera diterapkan dengan disahkannya UU no 18 tahun 2019 mengenai Pesantren. Hal ini ditegaskan bahwa penyelenggaraan pesantren harus memenuhi 10 azas, yaitu: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kebangsaan, (3) Kemandirian, (4) Keberdayaan, (5) Kemaslahatan, (6) Multikultural, (7) Profesionalitas, (8) Akuntabilitas, (9) Keberlanjutan, dan (10) Kepastian Hukum. Pesantren harus dapat menyusun laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi baku, sehingga dengan adanya UU ini maka kebutuhan pesantren akan pemahaman dan penerapan pedoman akuntansi pesantren menjadi lebih tinggi.

Bank Indonesia sebagai bank sentral yang memiliki visi menjadi bank sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia dan terbaik di antara negara *emerging markets* maka BI melakukan bauran kebijakan yang terdiri dari (1) kebijakan moneter, (2) kebijakan makroprudensial, (3) kebijakan sistem pembayaran, (4) pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, dan (5) pengelolaan uang rupiah. Sebagai upaya optimalisasi pengembangan ekonomi syariah maka pada tanggal 6 Juni 2017 diterbitkan *blue print* pengembangan ekonomi dan keuangan syariah (Gambar 1). Di mana indikator utamanya adalah pertumbuhan usaha syariah, share pembiayaan syariah, pertumbuhan pasar uang syariah, indeks literasi, dan instalasi internasional.

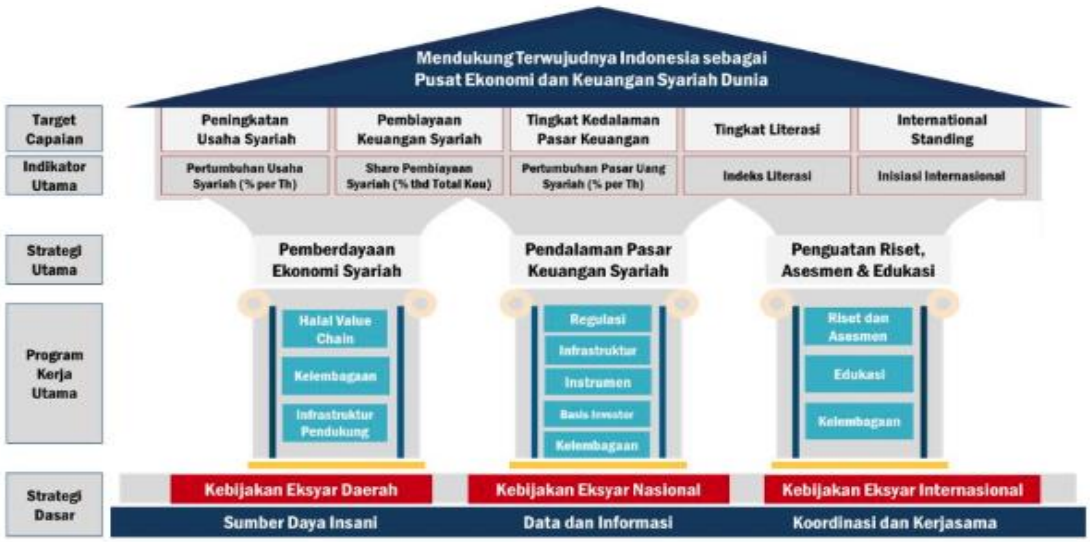

Gambar 1. *Blue Print* Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah
Sumber: bi.go.id

Salah satu aspek dalam pemberdayaan ekonomi syariah adalah dengan mengembangkan usaha-usaha syariah di pesantren. Sebagaimana diungkapkan oleh Gubernur BI dalam pembukaan Festival Ekonomi Syariah (FES) 2018 pada 2 Mei 2018 bahwa BI akan terus mendorong pengembangan ekonomi pesantren, UMKM syariah, maupun industri halal sebagai suatu ekosistem yang utuh dalam *local halal value chain* sebagai langkah yang tepat untuk mengoptimalkan besarnya potensi ekonomi syariah regional. Tema yang diangkat dalam FES 2018 adalah "Peningkatan Peran Pesantren dan Industri Halal dalam Pengembangan Ekonomi Syariah".

Berdasarkan data Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) BI sampai dengan Tahun 2018 sebanyak 148 pesantren sudah menjadi mitra kerja BI. Pesantren tersebut mulai menjalankan dan mengembangkan usaha-usaha syariah yang produktif baik dalam sektor pertanian, peternakan, perikanan, dagang, jasa, pengolahan sampah, dan pengolahan air minum (Gambar 2). Pesantren dengan usaha terbesar di bidang pertanian (22%) dan pengolahan air minum (18%), Hal ini terkait dengan kebutuhan pokok pesantren yang harapannya dapat dipenuhi dari internal pesantren.

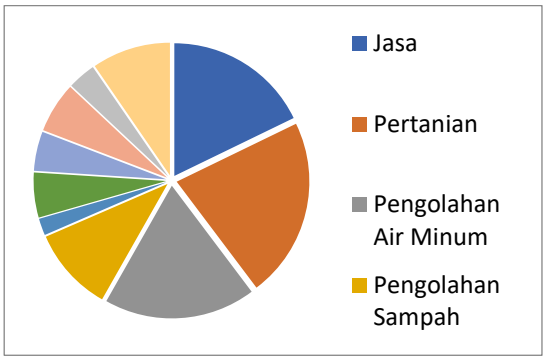

Gambar 2. Jumlah Pesantren Mitra Kerja BI Berdasarkan Sektor Usaha
Sumber: DEKS BI 2018, data diolah

Bank Indonesia mencanangkan tiga program kemandirian ekonomi pesantren untuk mendukung ekonomi Indonesia. Tiga program tersebut adalah (1) pengembangan berbagai unit usaha berpotensi memanfaatkan kerjasama antar pesantren, (2) mendorong terjalinnya kerjasama bisnis antar pesantren melalui penyediaan virtual market produk usaha pesantren sekaligus *business matching*, dan (3) pengembangan holding pesantren dan

penyusunan standarisasi laporan keuangan untuk pesantren dengan nama SANTRI (Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia) yang dapat digunakan oleh setiap unit usaha pesantren.

BI dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan melihat pentingnya penerapan akuntabilitas di pesantren dan semakin banyaknya pesantren yang mengembangkan usaha produktif maka di awal tahun 2018 menerbitkan pedoman akuntansi pesantren. Berdasarkan hasil wawancara dengan DEKS BI, bahwa dari mulai sosialisasi yang dilakukan dalam ISEF 2018 dan mengundang secara khusus 10 pesantren untuk uji coba pedoman akuntansi pesantren, namun ternyata belum satupun pesantren menerapkan pedoman ini. Sehingga perlu diteliti apa sajakah factor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Selain itu, penelitian mengenai penerapan akuntansi pada pesantren belum banyak dilakukan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan akuntansi pada pesantren mitra kerja BI dan menganalisis faktor internal eksternal yang mempengaruhi penerapan pedoman akuntansi pesantren.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kementerian Agama RI melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagai otoritas memiliki salah satu fungsi yaitu membina pesantren. Penelitian ini didasarkan pada kondisi pesantren saat ini di mana masih banyak permasalahan baik internal maupun eksternal pesantren di mana salah satunya adalah terkait dengan akuntabilitas yang merupakan hal yang dianggap masih tabu dibicarakan pada pesantren. Dengan terbitnya pedoman akuntansi pesantren yang diinisiasi oleh BI dan IAI maka ini menjadi langkah awal bagi pesantren untuk mulai menerapkan akuntansi standar baku pada operasional pesantren, terlebih dengan sudah mulai banyaknya pesantren yang memiliki usaha-usaha syariah yang produktif (bisnis) menuju kemandirian pesantren sehingga pedoman akuntansi ini akan mempermudah pesantren dalam menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk transparansi dalam pesantren.

Penerapan sebuah pedoman atau peraturan akan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang cakupan analisisnya lebih sempit seperti yang dilakukan oleh Murdiyanti (2017) yang meneliti mengenai faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pada pesantren dengan mengambil sampel 6 pondok pesantren di Jabodetabek. Faktor yang diteliti hanya internal pesantren saja, bahkan hanya satu komponen yaitu kompetensi SDM keuangan yang berpengaruh positif Selain itu juga berdasarkan pada penelitian terkait faktor yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di berbagai pemerintahan daerah. Hal ini diambil terkait bahwa pedoman akuntansi pesantren juga merupakan pedoman baru yang sebaiknya diterapkan di sebuah institusi (pesantren) sehingga memungkinkan faktor yang mempengaruhi ada kesamaan karena keduanya sama mengenai pedoman penerapan akuntansi. Jantong (2017) hanya memasukkan faktor internal pemerintah daerah dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yaitu kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan sarana prasarana. Begitu pula dengan Safitri (2017), Putra dan Ariyanto (2015) hanya melihat faktor internal saja. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang hanya melihat sisi internal, maka penulis menambahkan faktor eksternal sebagai faktor yang diduga mempengaruhi penerapan pedoman akuntansi pesantren sebagai sebuah terobosan baru dalam manajemen di Pesantren. Selain itu pedoman akuntansi pesantren ini sebuah hal yang sangat baru sehingga belum ada penelitian yang sama.

Gowon, dkk. (2015) dalam penelitian tinjauan literatur terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem pengukuran kinerja (yang semuanya adalah faktor internal)

di mana terdapat 10 faktor yang paling banyak diungkap dari berbagai jurnal yaitu (1) dukungan dan komitmen pimpinan, (2) kualitas desain SPK, (3) budaya organisasi, (4) komunikasi strategi dan harapan, (5) gaya dan skill kepemimpinan, (6) keterlibatan dan persepsi karyawan, (7) program insentif, (8) pelatihan keterampilan karyawan, (9) alokasi/ permintaan sumber daya, dan (10) visibilitas penggunaan sistem dan hasil. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menduga hanya factor internal yang mempengaruhi penerapan sebuah aturan atau pedoman, sehingga dikembangkan dengan pendugaan pengaruh faktor eksternal.

Pendugaan terhadap faktor internal dan eksternal didasarkan survei awal dengan menggunakan kuesioner terbuka yang dilakukan oleh penulis kepada pimpinan dan pengelola 27 pesantren yang mengikuti IFES 2018 di Surabaya (tanggal 11-14 Desember 2018). Pada IFES 2018 inilah baru diinformasikan mengenai adanya pedoman akuntansi pesantren secara umum dalam *opening ceremonial*. Hasil survei awal adalah bahwa pihak pesantren menganggap bahwa pedoman akuntansi pesantren dapat dilaksanakan atau tidak tidak hanya tergantung bagaimana kondisi internal pesantren namun juga bagaimana kondisi eksternal seperti sosialisasi yang BI lakukan dan bagaimana peran Kementerian Agama sebagai otoritas yang membawahi langsung pesantren. Hasil tersebut kemudian didiskusikan dengan para akademisi dan tim DEKS BI yang akhirnya dikerucutkan bahwa terdapat tujuh faktor internal yang diduga mempengaruhi penerapan pedoman akuntansi pesantren yang terdiri dari (1) kesadaran pencatatan syariah, (2) komitmen organisasi, (3) ketersediaan perangkat teknologi, (4) kompetensi sumber daya manusia, (5) struktur pendanaan pesantren, (6) struktur organisasi pesantren dan (7) kemampuan manajerial pemimpin. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari (1) kebijakan otoritas, (2) kebijakan pihak pemberi bantuan/kerjasama, (3) sosialisasi pedoman akuntansi pesantren, (4) pelatihan teknis dan (5) pendampingan teknis.

O'Brien dan Marakas (2009) bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya sebuah organisasi dalam menerapkan sebuah sistem informasi. Faktor tersebut meliputi dukungan dari manajemen, keterlibatan *end user*, penggunaan kebutuhan organisasi, perencanaan organisasi, dan harapan organisasi. Wheelen dan Hunger (2003) membedakan lingkungan organisasi yang mempengaruhi organisasi adalah (1) lingkungan internal (*internal environment*) yang terdiri dari struktur, budaya dan sumber daya, dan (2) lingkungan eksternal (*external environment*). Berdasarkan penelitian dan teori tersebut maka dikembangkan hipotesis sebagai berikut.

H1: Faktor internal (kesadaran pencatatan Syariah, komitmen organisasi, ketersediaan perangkat teknologi, kompetensi sumber daya manusia, struktur pendanaan pesantren, kemampuan manajerial pemimpin) mempengaruhi penerapan pedoman akuntansi pesantren

H2: Faktor eksternal (kebijakan otoritas, kebijakan pihak pemberi bantuan/kerjasama, sosialisasi pedoman akuntansi pesantren, pelatihan teknis pendampingan teknis) mempengaruhi penerapan pedoman akuntansi pesantren.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didasari pada kondisi penerapan pedoman akuntansi pesantren yang masih sangat rendah sehingga perlu dikaji faktor apa sajakah yang mempengaruhi hal tersebut. Satu tahun sejak disahkan belum ada respon dari pesantren terkait dengan penerapannya.

Tahap pertama dilakukan analisis terhadap praktek akuntansi yang berlaku pada pesantren saat ini, sehingga akan didapatkan

pencatatan apa sajakah yang sudah dilakukan terhadap transaksi keuangan yang terjadi di pesantren. Apakah belum/sudah mengikuti standar akuntansi baku. Tahap kedua adalah pendugaan terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penerapan pedoman akuntansi pesantren.

Populasi dalam penelitian ini adalah pesantren mitra kerja BI yang telah mengikuti sosialisasi pedoman akuntansi pesantren yang diselenggarakan oleh BI, hal ini terkait dengan informasi mengenai isi pedoman akuntansi pesantren baru dilakukan kepada beberapa pesantren mitra kerja BI. Teknik sampling yang dipergunakan adalah *nonprobability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Cara pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* di mana penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangannya adalah bahwa jumlah pesantren mitra kerja Bank Indonesia sampai tahun 2018 adalah sebanyak 148 pesantren, namun yang sudah mengikuti sosialisasi pedoman akuntansi pesantren baru 10 pada tahun 2018 dan dilanjutkan sosialisasi ulang pada Juli tahun 2019 dengan peserta sebanyak 37 pesantren sehingga total adalah sebanyak 47 pesantren. Terdapat 31 pengelola pesantren yang mengisi kuesioner.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik survey melalui kuesioner dengan sasaran pengurus pesantren yang menjadi sampel. Selain itu, dilakukan pula *indepth interview* dengan pengurus IAI wilayah yaitu wilayah Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat (di mana terdapat pesantren yang didampingi oleh tim IAI dalam penyusunan neraca awal dan laporan keuangan) untuk mempertegas faktor yang mempengaruhi penerapan pedoman akuntansi pesantren.

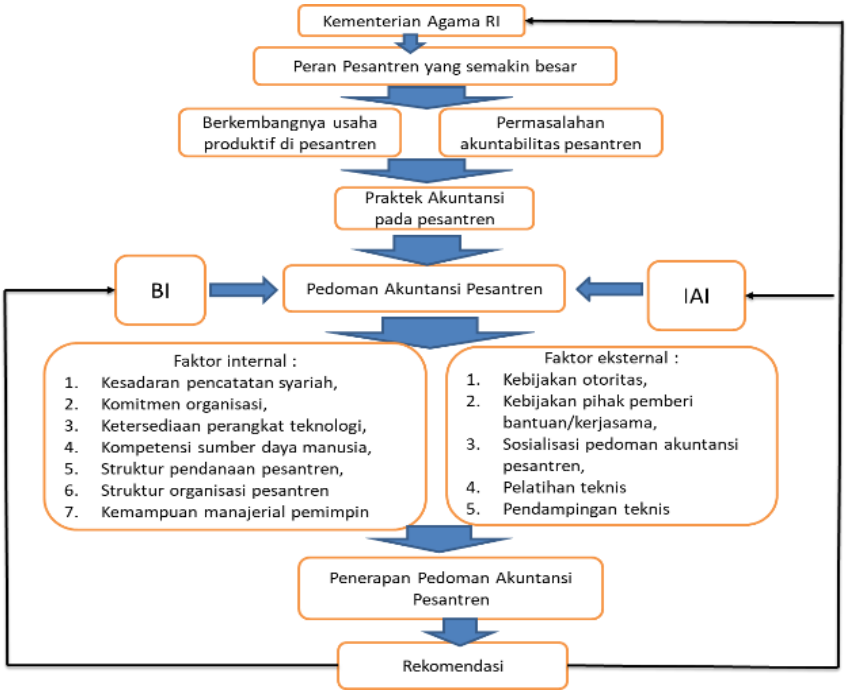

Gambar 3. Kerangka Pemikiran Penelitian

Analisa data kuantitatif dengan menggunakan SEM-PLS dengan pertimbangan bahwa jumlah sampel yang tidak terlalu besar dan terdapat pendugaan terhadap variabel bebas yang belum teruji serta hanya mengijinkan model hubungan antar variabel

searah (*recursif*). Dalam SEM PLS menggunakan 3 komponen (Monecke dan Leisch, 2012) yaitu model struktural, model pengukuran dan skema pembobotan. Selain itu SEM PLS ini tidak harus memenuhi persyaratan asumsi normalitas data. Selain dapat digunakan sebagai konfirmasi teori, PLS juga dapat digunakan untuk membangun hubungan yang belum ada landasan teorinya atau untuk pengujian proposisi (Ghozali, 2008). Pemodelan analisis jalur dalam PLS terdiri dari tiga set hubungan. Pertama adalah i*nner model* (*structural model*) yang menspesifikasikan hubungan antar variabel laten berdasarkan teori. Model persamaannya adalah sebagai berikut.

$$\eta j = \Sigma i\, \beta ji\, \eta i + \Sigma i\, \gamma jb\, \xi b + \zeta j \qquad (1)$$

Di mana η menggambarkan vector endogen (dependen) variabel laten, ξ adalah vektor variabel eksogen, ζ_j adalah vector variabel residual, β_{ji} dan γ_{jb} adalah koefisien jalur yang menghubungkan prediktor endogen dan laten eksogen sepanjang range indeks i dan b.

Kedua adalah *outer Model* (*measurement model*) yang menspesifikasikan hubungan antar variabel laten dengan indikator. *Outer Model* terdiri dari 2 macam mode, yaitu mode *reflective* (mode A) dan mode *formative* (mode B). Mode reflektif merupakan relasi dari variabel laten ke variabel indikator atau "*effect*". Sedangkan mode *formative* merupakan relasi dari variabel indikator membentuk variabel laten "*causal*". Blok dengan indikator reflektif memiliki bentuk persamaan sebagai berikut.

$$x = \lambda x\, \xi + \delta \qquad (2)$$
$$y = \lambda y\, \eta + \varepsilon \qquad (3)$$

Di mana x dan y adalah indikator untuk variabel laten eksogen dan endogen. Sedangkan λ_x dan λ_y merupakan matrik loading yang menggambarkan koefisien regresi sederhana yang menghubungkan variabel laten dengan indikatornya. Residual diukur dengan δ dan ε sebagai kesalahan pengukuran.

Blok dengan indikator formatif memiliki persamaan sebagai berikut.

$$\xi = \lambda x\, X + \delta\xi \qquad (4)$$
$$\eta = \lambda y\, Y + \delta\eta \qquad (5)$$

Di mana, ξ adalah vektor variabel eksogen, λ_x dan λy adalah koefisien regresi berganda dari variabel laten dan blok indikator, di mana δ_ξ dan δ_η adalah residual dari regresi.

Ketiga adalah weight relation yang memberikan spesifikasi yang diikuti dalam estimasi algoritma PLS. Nilai kasus untuk setiap variabel laten di estimaasi dalam PLS sebagai berikut.

$$\xi b = \Sigma kb Wkb\, X\, kb \qquad (6)$$
$$\eta i = \Sigma ki Wki Xki \qquad (7)$$

Di mana, Wkb dan Wki = k *weight* yang digunakan untuk membentuk estimasi variabel laten ξb dan ηi. Estimasi variabel laten adalah linear agregat dari indikator yang nilai *weight*-nya didapat dengan prosedur estimasi PLS seperti dispesifikasikan oleh *inner* dan *outer* model di mana η adalah vektor variabel laten endogen (dependen) dan ξ adalah vektor variabel laten eksogen (independen).

Analisis ini dipergunakan untuk melihat pengaruh faktor internal yang meliputi kesadaran pencatatan secara syariah ($x_{1.1}$), komitmen organisasi ($x_{1.2}$), ketersediaan perangkat teknologi ($x_{1.3}$), kompetensi sumber daya manusia ($x_{1.4}$), struktur pendanaan pesantren ($x_{1.5}$), struktur organisasi ($x_{1.6}$), kemampuan manajerial pimpinan ($x_{1.7}$) dan faktor eksternal yang terdiri dari kebijakan otoritas ($x_{2.1}$), kebijakan pihak pemberi bantuan/kerjasama ($x_{2.2}$), sosialisasi pedoman ($x_{2.3}$), pelatihan teknis ($x_{2.4}$) dan pendampingan teknis ($x_{2.5}$) terhadap penerapan pedoman akuntansi pesantren (Y) yang diproksikan ke

dalam akuntansi aset (Y_1), akuntansi liabilitas (Y_2), akuntansi aset neto (Y_3), akuntansi arus kas (Y_4), dan catatan atas laporan keuangan (Y_5).

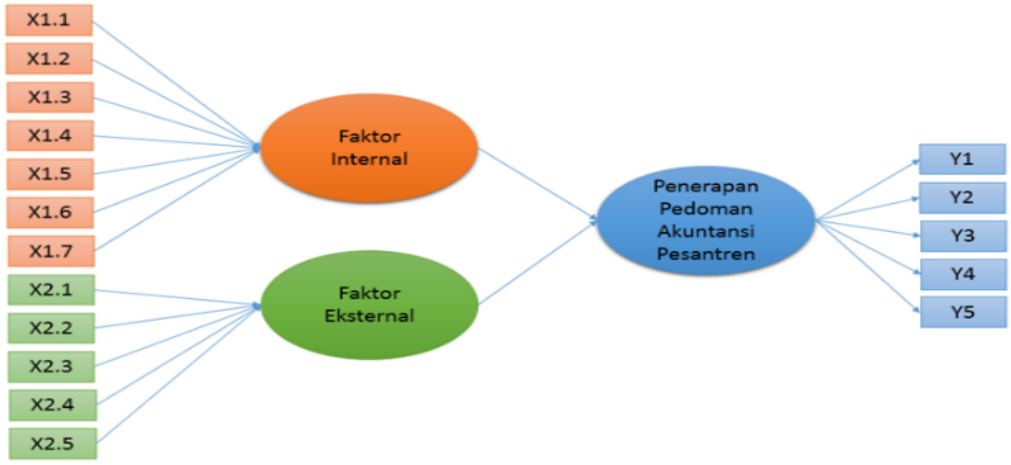

Gambar 4. Model Awal Penelitian (SEM-PLS)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pesantren yang menjadi sampel tersebar di Sulawesi Tengah dan Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Di Yogyakarta, Sumatera Barat dan Utara, Bangka Belitung, Kalimantan (Tengah, Utara, Selatan, Timur), Nusa Tenggara Barat dan Timur, maluku, Riau, Lampung dan Aceh. Terkait dengan luasnya area sehingga pengambilan sampel dilaksanakan di Jakarta.

Karakteristik pesantren yang dikaji dalam penelitian ini meliputi usia pesantren, penggunaan jenis bank, dan bidang usaha. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner oleh 31 pengelola dari 31 pesantren bahwa sebanyak 28 pesantren (90,3%) memiliki usia lebih dari 15 tahun yang menandakan kemapanan pesantren. Penggunaan jenis bank yang dibagi ke dalam bank konvensional dan bank Syariah hal ini terkait dengan pesantren sebagai sebuah institusi Pendidikan Islam yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi syariah, ternyata sebanyak 55% pesantren masih menggunakan bank konvensional dengan alasan jaringan bank Syariah masih sedikit. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi bank Syariah untuk dapat mendekatkan diri kepada pesantren.

Pesantren yang merupakan mitra kerja BI sebagian besar sudah memiliki usaha, dan yang menjadi sampel semua sudah memiliki usaha. Adapun jenis usaha pesantren adalah sebesar 33% adalah merupakan bidang jasa yang meliputi *laundry*, katering, dan percetakan. Hal ini terkait dengan padatnya kegiatan santri sehingga jasa *laundry* menjadi hal utama yang dicari selain jasa katering, hal ini yang menyebabkan tingginya kebutuhan akan usaha jenis ini dan pesantren mengupayakan usaha ini masuk dalam usaha pesantren selain memudahkan santri juga menjadi salah satu usaha produktif yang akan dapat menjadi *income generating* pesantren. Sedangkan bidang kedua terbesar (20%) adalah perdagangan yang meliputi minimarket, koperasi, toko peralatan, dan toko alat tulis. Untuk bidang ketiga terbesar merupakan kumpulan dari bidang pengolahan sampah, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, pengolahan air minum, agribisnis, dan konveksi.

Responden merupakan pengelola 31 pesantren yang telah mengikuti sosialisasi pedoman akuntansi pesantren. Karakteristik responden berdasarkan jabatan sebanyak 71% adalah pengelola keuangan pesantren, hal ini terkait dengan acara yang dilaksanakan adalah

sosialisasi pedoman akuntansi pesantren. Dengan tingkat Pendidikan terbesar (58%) adalah lulusan S1 (Sarjana).

Penerapan akuntansi pada pesantren mitra kerja BI yang dianalisis secara deskriptif meliputi pencatatan perolehan aset, balik nama aset, pencatatan kas kecil, revaluasi aset, dan penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner dan *indepth interview* sebanyak 84% pesantren melakukan pencatatan perolehan aset dan hal ini yang biasanya dicantumkan di papan depan pesantren. Namun hal yang berkaitan dengan perolehan aset yang biasanya bersumber dari wakaf tidak dilakukan balik nama oleh pihak pesantren, hal ini akan merugikan jika di kemudian hari ada pihak dari wakif yang menuntut dikembalikannya wakaf tersebut. Selain itu dengan belum dilakukannya balik nama maka secara akuntansi sulit diakui sebagai aset pesantren. Selain itu pesantren juga tidak melakukan revaluasi terhadap aset pesantren sehingga nilai aset tidak mencerminkan nilai saat ini (hanya 2 pesantren yang pernah sekali melakukan revaluasi itupun sudah cukup lama). Hal ini menjadi penting dilakukan agar nilai aset yang dilaporkan sesuai dengan kaidah akuntansi.

Berkaitan dengan laporan keuangan yang disusun, sebanyak 100% pesantren menyatakan menyusun laporan arus kas yang terdiri dari laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas namun belum sesuai kaidah akuntansi baku. Sedangkan yang sudah menyusun laporan keuangan berupa neraca hanya 3 pesantren (itu pun tidak kontinu) yang lainnya (90,3%) menyatakan tidak melakukan penyusunan laporan keuangan.

Hasil analisis SEM

SEM PLS yang diawali dengan pengujian terhadap reliability dan cronbach's alpha dihasilkan bahwa Hasil pengujian *reliability* dan *cronbach's alpha* dari Smart PLS pada Tabel 1.

Tabel 1. Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

Construct	Composite Reliability	Cronbach's Alpha
Faktor Internal	0,973	0,958
Faktor Eksternal	0,818	0,682
PPAP	0,975	0,967

Konstruk dinyatakan reliabel jika memiliki nilai *composite reliability* di atas 0,70 *dan cronbach's alpha* di atas 0,60. Dari hasil output SmartPLS di atas semua konstruk memiliki nilai *composite reliability* di atas 0,70 *dan cronbach's alpha* di atas 0,60. Jadi dapat disimpulkan bahwa konstruk memiliki reliabilitas yang baik.

Model awal hasil olahan smart PLS adalah bahwa terdapat 2 faktor internal yang memiliki *loading factor* di atas 0,7 yaitu internal 1 (kesadaran pencatatan akuntansi secara Syariah) dan internal 3 (ketersediaan perangkat teknologi). Sedangkan dari sisi faktor eksternal adalah eksternal 3 (sosialisasi pedoman), eksternal 4 (pelatihan teknis), dan eksternal 5 (pendampingan teknis).

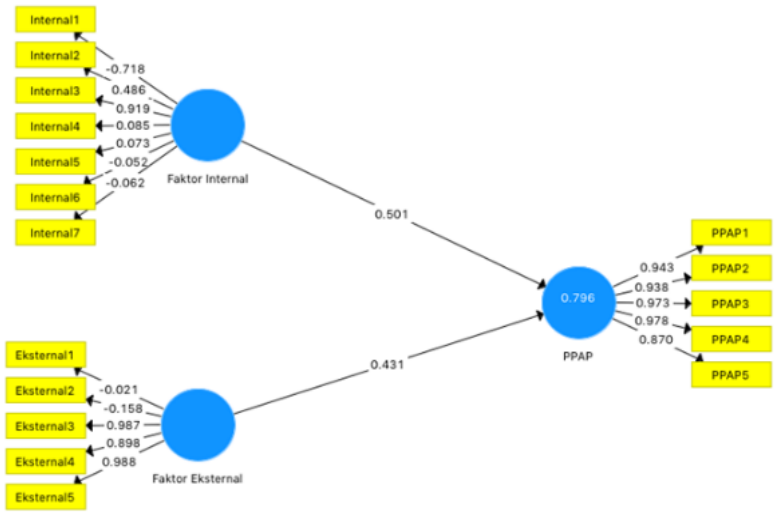

Gambar 5. Model awal SEM

Tahap berikutnya adalah dilakukan proses *boothstrapping* untuk menghilangkan faktor yang memiliki nilai loading faktor di bawah 0,7 dan menghasilkan model akhir sebagai berikut

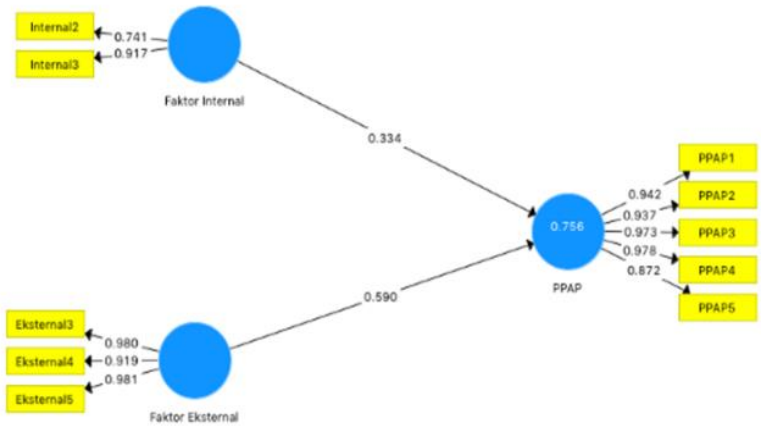

Gambar 6. Hasil PLS Boothstrapping

Untuk menilai signifikansi model prediksi dalam pengujian model struktural, dapat dilihat dari nilai *t-statistic* antara variabel independen ke variabel dependen dalam tabel *Path Coefficient* pada *output* SmartPLS di bawah ini (Tabel 2).

Tabel 2. Path Coefficients (Mean, STDEV, P-Value)

	Original sample estimate	mean of subsamples	Standard Deviation	P-Value
F.Int ➔ PPAP	0,334	0,323	0,274	0,023
F.Eks ➔ PPAP	0,590	0,589	0,271	0,030

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dilihat nilai *original sample estimate LS* adalah sebesar 0,334 dengan signifikansi di bawah 5% yang ditunjukkan dengan P-value 0,023 lebih kecil dari alpha sebesar 5%. Nilai *original sample estimate* positif mengindikasikan bahwa faktor internal berpengaruh positif terhadap Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren (PPAP). Berdasarkan hasil regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa **hipotesis pertama diterima.**

Hasil pengujian hipotesis ke dua dapat dilihat dari nilai *original sample estimate* sebesar 0,590 dengan nilai P-value 0,030 < 5% yang berarti faktor eksternal berpengaruh positif terhadap Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren (PPAP). Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa **hipotesis 2 diterima**.

Hasil dari proses *boothstrapping* pada Gambar 6 terlihat bahwa faktor internal yang mempengaruhi secara signifikan adalah komitmen organisasi (I2) dan ketersediaan perangkat teknologi (I3). Berdasarkan indepth interview dengan pengelola pesantren bahwa apa yang diperintahkan oleh kyai itulah yang dikerjakan sehingga pada saat kyai tidak berkenan maka tidak dilaksanakan. Begitu besarnya pengaruh kyai dalam hal ini adalah pimpinan pesantren sehingga segala sesuatu keputusan harus berdasarkan bagaimana arahan dari kyai, sehingga komitmen organisasi yang dikaitkan dengan kuatnya pengaruh kyai menjadi faktor yang memiliki pengaruh signifikan, jika kyai memutuskan untuk menerapkan maka para pengelola di bawahnya akan segera melaksanakan. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh tim IAI wilayah yang mendampingi proses penyusunan neraca awal dan laporan keuangan satu periode bahwa dari 5 pesantren yang menjadi *pilot project* yang dapat menghasilkan neraca awal dan laporan keuangan satu periode adalah hanya tiga pesantren karena komitmen yang sangat baik dari pimpinan pesantren, sangat mendukung dengan terlibat dalam proses pengumpulan data aset yang diperoleh pada awal-awal pendirian pesantren dan data lainnya.

Hasil temuan ini jika dikaitkan dengan akuntabilitas dalam Islam di mana salah satu tujuannya adalah dalam rangka menerapkan hukum Ilahi (Al Qur'an dan As-Sunnah), bahwa seharusnya sebagai pimpinan institusi Pendidikan Islam memberikan contoh dalam penerapan akuntabilitas di pesantren. Sebagaimana dalam Al-Qur'an kata *hisab* diulang lebih dari delapan kali dalam ayat yang berbeda-beda (Askary dan Clarke, 1997), hisab sebagai akar dari akuntansi di mana bentuk pertanggungjawaban setiap tindakan yang berhubungan dengan keuangan pesantren terutama ditujukan kepada masyarakat atau stakeholders lainnya. Dalam konteks *hisab* menurut Islam, maka Ibnu Taimiyah mengaitkan dengan perintah amar ma'ruf nahi munkar (Mukhlisin and Mustafida, 2017). Sebagaimana disebutkan dalam Qur'an Surat Hud ayat 85 "Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di Bumi dengan berbuat kerusakan." Pemimpin pada pesantren dengan memiliki komitmen untuk menerapkan pedoman akuntansi pesantren maka berarti

telah menjalankan hukum Ilahi sebagaimana ditegaskan dalam Al-Baqarah ayat 282 dan anjuran dalam surat Hud ayat 85. Tafsir surat Hud ayat 85 menurut Ibnu 'Abbas "Rizki Allah adalah lebih baik bagimu". Ar-Rabi' bin Anas berkata "Wasiat Allah adalah lebih baik bagimu". Qatadah berkata "Bagianmu dari Allah adalah lebih baik bagimu".

Faktor internal lainnya yang juga mempengaruhi adalah ketersediaan perangkat teknologi, hal ini terkait data yang cukup banyak akan lebih efisien jika digunakan komputer sebagai salah satu perangkat teknologi, selain itu akan memudahkan pencarian laporan yang sudah disusun dan data lainnya jika sudah dilakukan komputerisasi. Selain itu dengan adanya *software* SANTRI yang akan mendukung penerapan pedoman akuntansi pesantren maka akan membutuhkan komputer dan perangkatnya. Sehingga jika pesantren tidak memiliki perangkat teknologi tersebut maka akan mengalami kesulitan. Berdasarkan *indepth interview* dengan pengelola pesantren bagian keuangan dan perusahaan pembuat *software* SANTRI bahwa komputer yang saat ini dimiliki oleh pesantren bisa jadi tidak kompatibel dengan *software* SANTRI, sehingga kebutuhan komputer menjadi hal yang krusial juga untuk pesantren jika ingin menggunakan *software* SANTRI. Jika dilihat dari besaran pengaruh, maka dari kedua faktor internal yang memiliki pengaruh paling besar adalah ketersediaan perangkat teknologi sebesar 0,917 sedangkan komitmen organisasi memiliki pengaruh sebesar 0,741.

Penerapan pedoman akuntansi pesantren sebagai sebuah hal yang baru bagi pesantren agar dapat diadopsi dengan baik dan benar maka akan sangat terpengaruh oleh hal-hal yang berkaitan dengan pemberitahuan sampai kepada timbulnya kemampuan untuk menerapkan pedoman tersebut. Berdasarkan hasil *bootstrapping* bahwa faktor eksternal yang memiliki pengaruh signifikan adalah pelatihan teknis pedoman akuntansi pesantren (0,919), pendampingan teknis pedoman akuntansi pesantren (0,981) dan sosialisasi pedoman akuntansi pesantren (0,980). Hal ini sesuai dengan *indepth interview* yang dilakukan kepada pimpinan pesantren, bahwa pedoman akuntansi pesantren ini adalah suatu hal yang baru bagi pesantren, maka hal yang harus dilakukan pertama kali adalah sosialisasi pedoman akuntansi pesantren secara lebih rinci, hal ini dikemukakan oleh pimpinan pesantren pada saat menghadiri peluncuran program kemandirian ekonomi pesantren pada ISEF 2018 bahwa pesantrennya belum mendapatkan sosialisasi secara detil mengenai pedoman akuntansi pesantren secara detil, namun mengetahui dari beberapa pesantren yang sudah mendapatkan sosialisasi sehingga belum mendapatkan gambaran secara detil mengenai isi dari pedoman akuntansi pesantren tersebut. Dengan dilakukan sosialisasi maka pengelola pesantren akan mengenal pedoman tersebut, namun hanya mengetahui isi dan maksud dari dibuatnya pedoman.

Tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah pelatihan teknis pedoman akuntansi pesantren. Di mana dalam proses pelatihan teknis maka tahapan dalam proses penyusunan neraca awal sampai kepada proses akuntansi dalam satu siklus yang akan menghasilkan laporan keuangan akan dapat diketahui dan dipahami secara praktiknya. Walaupun jika kedua hal tersebut sudah dilakukan juga belum tentu langsung dapat diterapkan mengingat hal ini adalah hal yang baru bagi pesantren, hal ini sesuai dengan hasil pendampingan yang dilakukan oleh IAI, bahwa sangat sulit mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan neraca awal pesantren sebagai pijakan awal penyusunan laporan keuangan pesantren sampai kepada proses penyusunan laporan keuangan. Maka tahapan berikutnya yang harus dilakukan adalah pendampingan.

Tahapan yang harus dilakukan selanjutnya adalah adanya pendampingan teknis mengenai penerapan pedoman

akuntansi pesantren tersebut, di mana hal ini sudah dilakukan uji coba kepada 3 pesantren dan mampu dihasilkan laporan keuangan pesantren sesuai standar akuntansi baku dalam kurun waktu paling cepat adalah 3 bulan. Maka selaras jika ketiga faktor eksternal tersebut menjadi faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan pedoman akuntansi pesantren ini. Jika dilihat dari besaran nilai pengaruh, maka pendampingan teknis menjadi faktor yang memiliki pengaruh terbesar hal ini dapat dipahami karena masih terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM yang dimiliki oleh pesantren.

PENUTUP

Pencatatan yang mayoritas dilakukan oleh pesantren masih sebatas perolehan aset dan kas kecil. Faktor internal berpengaruh terhadap penerapan pedoman akuntansi pesantren di mana ketersediaan perangkat teknologi dan komitmen organisasi menjadi faktor yang signifikan. Sedangkan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap penerapan pedoman akuntansi pesantren dengan faktor yang signifikan adalah bimbingan teknis, pelatihan teknis dan sosialisasi pedoman akuntansi pesantren. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah faktor internal dan eksternal dari penelitian ini dapat menjadi landasan untuk diuji ulang pada pesantren yang bukan mitra kerja BI namun yang mengetahui mengenai pedoman akuntansi pesantren ini. Sedangkan saran bagi BI dan IAI agar dapat berkolaborasi dengan civitas akademik kampus-kampus dekat area pesantren untuk dapat melakukan sosialisasi sekaligus pendampingan sehingga dapat mengoptimalkan penerapan pedoman akuntansi pesantren ini.

REFERENSI

Al-Attas, S.M.A. (1975). *Islam and The Philosophy of Science*. Kuala Lumpur: Art Printing Works.

Bank Indonesia. (2019). *Bank Indonesia Dorong Peningkatan Peran Pesantren dan Industri Halal*. https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/BI-Dorong-Peningkatan-Peran-Pesantren-dan-Industri-Halal.aspx [diakses: 7 Juli 2019).

Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). Pedoman Akuntansi Pesantren. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.

Ghozali, I. (2005). *Structural Equation Modelling Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Program Lisrel 8.45*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. (2008). *Structural Equation Modelling Metode Alternatif dengan Partial Least Square. Edisi 2*. Semarang : Universitas Diponegoro

Gowon, M dan Kusumastuti, R. (2015). Tinjauan Literatur Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja. *Prosiding: Seminar Nasional danThe 2nd Call for Syariah Paper*.

Izfana, dkk. (2012). A Comprehensive Approach in Developing Akhlaq: A case study on the implementation of character education at Pondok Pesantren Darunnajah. *Multicultural Education & Technology Journal*, 6(2), 77-86.

Jantong, A. (2017). Faktor Determinan Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Manggarai Nusa Tenggara Timur. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 1(2). https://doi.org/10.21787/mp.1.2.2017.109-119.

Monecke, A dan Leisch, F. (2012). SEM PLS: Structural Equation Modeling Using Least Square. *Journal of Statistic Software*, 48(3).

Mukhlisin, M. (2015). *Is There a political economy of accounting in financial*

reporting standardizations for IFIs. https://www.researchgate.net/publication/289531280_Is_there_a_political_economy_of_accounting_in_financial_reporting_standardization_for_the_Islamic_financial_institutions [diakses: Juli 2019].

Mukhlisin, M. dan Antonio, M.S. (2018). Meta Analysis on Direction of Accounting Standards for Islamic Financial Institutions : Case Studies in United Kingdom and Indonesia. *Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah,* 10(1).

Mukhlisin, M. dan Mustafida, R. (2017). Two Words in Islamic Accounting Research, Accountability and Sustainability. *Presented at AAABC International Conference, Bandung, Indonesia, 27-28 Oktober 2017*.

O'Brien J.A. dan Marakas, G. M. (2009). *Management Information System, Ninth Edition*. Boston: Mc Graw Hill, Inc.

Putra. D. dan Ariyanto, D. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 13(1).

Safitri, D. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (studi pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 174-189.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Yahya, FA. (2015). Problem Manajemen Pesantren, Sekolah, Madrasah : Problem Mutu dan Kualitas Input-Proses-Output. *Jurnal El Tarbawi*, 8(1).